



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 221/27112008
HARI : KAMIS
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Indonesia Kutuk Serangan Teroris di Mumbai	3
	UE-AS Kutuk Serangan di Mumbai	3
	Presiden SBY Hadiri Pembukaan Forum Parlemen Asia	4
	ILO: Upah Pekerja Akan Menurun, Uni Eropa Serukan Koordinasi Lebih Baik	4
	Bandara Dikepung, Semua Penerbangan Lumpuh	5
	LAPORAN OECD Australia Akan Terbebas dari Krisis	7
	KTT Asean Tetap Diselenggarakan di Thailand	8
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	KPK Awasi Aliran Bantuan Luar Negeri	8
	Pejabat Diminta Waspada Intel Asing	9
	B. EKONOMI	
	RI - China Saling Undang Untuk Berinvestasi	9
	Sektor Agrobisnis Akan Pulih Enam Bulan Lagi	10
	RI-Belgia Kembangkan Pelayaran Langsung	10
	Pinjaman luar negeri tak dijadwal ulang	11
	C. SOSBUD	

		JiFFest Ke-10 Suguahkan Film-film Terbaik	12
	D.	HANKAM	--
	E.	HUKUM	--
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Climate change threatens food resilience in some regions	12
III.	ARTIKEL		
		No recession in Indonesia (by Terry Lacey)	13
		Janji APEC Atasi Krisis Dalam 18 Bulan (Oleh Dody Ardiansyah)	14
IV.	LAIN-LAIN		--
V.	EDITORIAL		
		Perompak-perompak Somalia	16
		APEC and Obama's message	17

Jakarta, 27 Nopember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Indonesia Kutuk Serangan Teroris di Mumbai

Pemerintah Indonesia mengutuk serangan teroris di Mumbai, India, pada Rabu malam yang menewaskan hampir 100 orang, termasuk sejumlah warga asing.

Juru Bicara Deplu RI, Teuku Faizasyah, menyatakan bahwa hingga kini warga Indonesia yang tinggal di Mumbai diketahui selamat.

"Kita mengecam keras aksi itu, serangan yang menimbulkan korban tidak berdosa dan orang-orang yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan kelompok tersebut (teroris, red)," kata Faizasyah ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Indonesia berharap pemerintah India segera dapat mengatasi situasi di Mumbai serta menangkap para pelaku dan otak di balik penyerangan.

"Kita berharap pemerintah setempat dapat membangun kembali situasi yang aman," ujar Faizasyah.

Melalui perwakilan India di Jakarta, kata Jubir, Indonesia juga telah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban tak berdosa dalam serangan yang terjadi pada Rabu (26/11) malam itu.

Perwakilan Indonesia di Mumbai, menurut Faizasyah, telah menjalankan proses untuk memastikan keberadaan warga Indonesia di Mumbai, yang saat ini berjumlah sekitar 130 orang.

"Menurut laporan, alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban ledakan. Semuanya selamat," katanya.

Kebanyakan warga Indonesia yang tinggal di Mumbai adalah keluarga perwakilan Indonesia serta mereka yang menjadi pekerja di kota pusat bisnis di India itu.

Ketika menjawab pertanyaan, Faizasyah mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan mengeluarkan `travel advisory` (anjuran untuk tidak bepergian) ke India.

"Kita bukan negara yang terbiasa mengeluarkan `travel advisory`," katanya.

Yang pasti, tegasnya, perwakilan Indonesia di Mumbai telah mengingatkan warganya untuk menghindari diri melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu mendesak.

Warga Indonesia di Mumbai juga telah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, di manapun mereka berada.

Mumbai pada Rabu malam diguncang serangan teror berupa ledakan terkoordinasi serta penembakan membabi buta di delapan wilayah kota finansial tersebut.

Menurut pihak kepolisian negara bagian Maharashtra, sekitar 100 orang tewas dalam serangan ledakan dan penembakan.

Laporan lain mengatakan, serangan juga melukai setidaknya 300 lainnya.

Seperti yang dilaporkan media, pada Rabu malam beberapa pria bersenjata senapan dan granat menyerang dua hotel mewah, Taj Mahal Palace dan Trident-Oberoi, dan kemudian menyandera sejumlah warga asing.

Wakil ketua kabinet Maharashtra seperti dikutip Reuters mengatakan, Kamis, kemungkinan ada 100 hingga 200 tamu serta pekerja terjebak berada di Trident-Oberoi Hotel, di mana 10 hingga 12 teroris berada.

Satu kelompok yang menamakan diri "Mujahedeem Deccan" mengaku bertanggung-jawab atas serangan di tempat bersejarah Taj Mahal dan Hotel Trident serta sejumlah penembakan dan pemboman di tempat lain di Mumbai. (ANTARA)

2. UE-AS Kutuk Serangan di Mumbai

Komisi Eropa, badan pelaksana Uni Eropa (UE), dan Departemen Luar Negeri AS mengutuk serangan teror di Mumbai, Rabu (26/11) malam, yang menewaskan hampir 80 orang dan melukai sebanyak 250 orang, dan menyampaikan dukungan bagi pemerintah India dalam perang melawan aksi teror.

"Komisi Eropa menguruk dengan sangat keras serangan teror keji malam itu di Mumbai, yang telah merenggut banyak korban jiwa tak berdosa dan melukai banyak orang lagi. Aksi teror tak pernah dibenarkan dan bukan cara untuk mencapai sasaran. Kami mendukung pemerintah India dalam perang melawan aksi teror," kata komisi tersebut dalam satu pernyataan.

"Pikiran kami bersama keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang dicintai dan kami berharap mereka semua segera pulih dari luka ini," katanya. Pada saat yang sama, Presiden UE, Prancis, mengeluarkan pernyataan serupa.

Sedikitnya 80 orang tewas dan 250 orang lagi cedera ketika serangan teror melanda ibukota finansial India, Mumbai, Rabu larut malam, dalam serangkaian ledakan terkoordinasi dan penembakan membabi-butakan mengguncang delapan daerah di seluruh kota itu.

Di Washington, wakil jurubicara Departemen Luar Negeri AS Robert Wood, dalam suatu pernyataan, mengatakan, "Kami dengan keras mengutuk serangan teror yang telah terjadi di Mumbai, ... Simpati kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman mereka yang tewas dan cedera, dan rakyat Mumbai."

Jaringan *NBC*, dengan mengutip pernyataan seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, melaporkan semua diplomat AS di India selamat, tapi beberapa pejabat masih berusaha memastikan keadaan orang Amerika yang mungkin menginap di beberapa hotel dan daerah tempat serangan terjadi.

Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice "telah diberitahu mengenai serangan di Mumbai dan memantau keadaan secara seksama", kata seorang lagi pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Pejabat tersebut, yang tak ingin disebutkan jati dirinya dan menyatakan "situasi di lapangan sangat mudah berubah", menyatakan Rice berencana menghubungi para pejabat di Kedutaan Besar AS di New Delhi dan Konsulat AS di Mumbai. Ia juga berencana berbicara dengan para pejabat pemerintah India, katanya.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan Departemen itu tak mengetahui apakah ada warganegara Amerika yang menjadi korban serangkaian penembakan dan pemboman tersebut, yang tampaknya ditujukan kepada orang asing di ibukota finansial India.

Departemen itu membentuk pusat pengaduan buat orang Amerika yang ingin mengetahui keadaan teman dan keluarga mereka yang mengunjungi atau tinggal di Mumbai. (Media Indonesia)

3. Presiden SBY Hadiri Pembukaan Forum Parlemen Asia

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pembukaan Forum ketiga Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Kamis (27/11). APA dihadiri oleh 210 peserta dari 25 parlemen negara Asia serta tiga parlemen negara pengamat. APA adalah organisasi parlemen negara-negara Asia yang bekerjasama erat guna mewujudkan perdamaian.

Pertemuan APA pertama dilaksanakan di Bangladesh pada tahun 1999.

Pada forum ketiga di Jakarta, APA membahas berbagai macam isu seperti energi, ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah politik, sosial dan budaya di wilayah Asia.

Menanggapi kondisi internasional saat ini, dalam pertemuan tiga hari mulai 26 November hingga 29 November 2009, APA membahas kebutuhan Asia untuk struktur keuangan global yang baru.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan kebutuhan Asia untuk arsitektur baru keuangan global akan menjadi topik utama yang didiskusikan.

Hasil pertemuan APA ketiga di Indonesia, menurut Agung, akan dirumuskan dalam bentuk Deklarasi Jakarta pada akhir pertemuan. (Jurnal Nasional)

4. ILO: Upah Pekerja Akan Menurun, Uni Eropa Serukan Koordinasi Lebih Baik

Organisasi Buruh Internasional memperkirakan upah pekerja di negara maju turun 0,5 persen pada tahun 2009 karena krisis ekonomi global.

Walaupun demikian, pada tingkat global, upah masih akan naik 1,1 persen. Demikian disampaikan Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Geneva, Rabu (26/11).

"Pada tahun 2009, upah pada faktanya akan menurun sebesar 0,5 persen di negara maju dan bertumbuh tidak lebih dari 1,1 persen secara global," demikian pernyataan ILO dalam "Laporan Upah Global".

"Pertumbuhan global masih akan terjadi karena didukung negara-negara berkembang. Perekonomian mereka masih akan terus melaju walaupun melambat," ujar Manuela Tomei, pejabat ILO yang bertanggung jawab atas program keadaan pekerja.

Namun, ILO memperingatkan bahwa penurunan laju ekonomi akan tercermin dalam upah riil pekerja. Pekerja yang bergaji paling kecil merupakan kelompok yang terpukul paling telak.

"Pekerja yang total mencapai 1,5 miliar orang akan menghadapi waktu yang sulit tahun depan. Perlambatan pertumbuhan, atau bahkan pertumbuhan negatif ditambah dengan tingginya harga energi, akan mengikis upah riil para pekerja, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Kelas menengah juga akan merasakan dampaknya," ujar Direktur Jenderal ILO Juan Somavia.

Menghadapi resesi global, ILO memperingatkan agar perusahaan tidak menurunkan biaya produksi dengan cara pemangkasan tenaga kerja. Organisasi buruh itu juga menyerukan agar pemerintah melindungi daya beli dengan berbagai langkah, seperti menaikkan upah minimum.

"Dalam konteks sekarang ini, pemerintah diminta memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi daya beli masyarakatnya dan melakukan stimulasi konsumsi internal," ujar ILO.

ILO megaskan, upah cenderung tertinggal saat perekonomian membaik, tetapi cenderung menurun lebih dalam ketika perekonomian melemah.

Sepanjang 1995-2007, misalnya, setiap 1 persen penurunan produk domestik bruto (PDB) berarti penurunan upah 1,55 persen. Satu persen kenaikan PDB per kapita hanya menaikkan upah tahunan 0,75 persen.

Stimulus

Sementara itu, dalam menghadapi krisis global ini, Komisi Eropa menekankan agar 27 negara anggotanya bersatu dalam program dua tahun untuk mengatasi krisis.

Dalam proposal, Komisi Eropa secara jelas menyebutkan tentang pemangkasan suku bunga serta mengusulkan berbagai macam stimulus, mulai dari pemangkasan pajak hingga meningkatkan jaminan sosial.

Paket stimulus fiskal Uni Eropa mencapai 200 miliar euro (260 miliar dollar AS). Jumlah itu setara dengan 1,5 persen PDB dari 27 negara Uni Eropa. Keputusan ini untuk menjembatani berbagai kebijakan yang berbeda di antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Para pemimpin Uni Eropa akan mempelajari proposal itu pada KTT Uni Eropa 11-12 Desember. Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menekankan, pemerintah harus memperlakukan skema itu sebagai penawaran pilihan, bukan kebijakan yang kaku.

"Pendekatan kami adalah untuk menawarkan 'seperangkat alat'. Kebijakan yang diambil oleh negara anggota tidak harus sama, tetapi mereka harus terkoordinasi," ujar Barroso.

Perancis, Inggris, dan beberapa anggota Uni Eropa lainnya telah melakukan berbagai langkah meningkatkan ekonomi di dalam negeri masing-masing.

"Langkah yang telah diumumkan oleh anggota merupakan bagian dari upaya bersama ini," lanjut Barroso. Ia mengatakan masih belum jelas apakah skema yang lebih ambisius dibandingkan dengan paket yang sebesar 1 persen dari PDB, yang direncanakan sebelumnya, akan berjalan dengan efisien.

Ekonom memperlihatkan rasa skeptisnya mengenai bagaimana skema itu akan dikelola. "Langkah nyata yang akan dilakukan pemerintah masih merupakan pertanyaan terbuka dan jawabannya akan berbeda dari negara satu dengan lainnya," ujar Christoph Weil, ekonom Commerzbank. (Kompas)

5. Bandara Dikepung, Semua Penerbangan Lumpuh

Unjuk rasa oposisi Thailand semakin tidak terkendali setelah mereka menduduki Bandar Udara Suvarnabhumi dan melumpuhkan Bangkok. Benang kusut krisis politik Thailand makin sulit terurai setelah pemerintah menolak seruan panglima militer untuk menggelar pemilu dipercepat demi meredakan kekerasan.

Panglima Militer Thailand Jenderal Anupong Paochinda yang menjadi sosok kunci pada krisis politik di Thailand juga menyerukan agar unjuk rasa yang digalang Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) dihentikan dan mereka menarik diri dari bandara internasional Bangkok. Sama

halnya dengan pemerintah yang menolak seruan Anupong, para pengunjung rasa pun mengabaikan imbauan panglima militer.

Anupong tidak akan melancarkan kudeta setelah dua tahun silam militer menggulingkan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra. "Jika kudeta dapat mengakhiri masalah, saya akan melakukannya. Tapi ini tidak akan menyelesaikan apa pun," ujarnya di tengah spekulasi bahwa pemerintah mungkin akan memecatnya karena mengatakan hal tersebut.

Menyusul aksi oposisi yang menduduki Bandara Suvarnabhumi, Jenderal Anupong menjadi sosok yang diharapkan bisa menjadi penengah kubu yang bertikai, pemerintahan Perdana Menteri Somchai Wongsawat dan PAD yang dimotori raja media Sondhi Limthongkul.

Dalam rapat darurat tadi malam, Jenderal Anupong merilis rencana empat poin yang ditawarkannya untuk mengakhiri krisis politik berkepanjangan di Negeri Gajah Putih itu. Tawarannya ditolak kedua kubu. Juru Bicara Pemerintah Thailand Nattawut Saikuar menolak saran agar PM Somchai mundur.

"PM telah menegaskan berulang kali bahwa dia tidak akan mundur atau membubarkan parlemen karena dia telah terpilih secara demokratis. Dia tetap bertahan," katanya melalui televisi Channel 3 kemarin. Tidak ada reaksi dari PAD atas sikap pemerintah itu. Mereka tetap meneruskan "tekanan terakhir" pada pemerintah agar mundur dengan memblokade bandara utama di Bangkok dan menyebabkan berbagai penerbangan dibatalkan.

Kemarin PM Thailand Somchai Wongsawat hendak kembali dari pertemuan Asia-Pasifik di Peru. Penerbangannya telah diubah dan tujuannya saat ini tidak diumumkan ke publik. Dikabarkan, dia mendarat di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara. Media Thailand memperkirakan Somchai akan mendeklarasikan keadaan darurat di Bangkok.

Pemimpin pengunjung rasa, Sondhi Limthongkul, menolak tawaran berunding dari pemerintah untuk mengakhiri blokade bandara. "Anda (Somchai) harus mundur terlebih dulu sebelum kita duduk dan berunding dengan Anda," ujar Sondhi disambut teriakan ribuan pendukungnya di bandara. PAD menganggap pemilu yang dipercepat tidak akan memecahkan krisis politik di Thailand.

Mereka juga menolak mengakhiri blokade bandara. "Solusinya bukan pembubaran parlemen. PAD akan melanjutkan berada di Bandara Suvarnabhumi," kata Pibhop Dhongchai, salah seorang pemimpin PAD. Setelah sejumlah anggota PAD bertopeng menguasai menara kontrol di Bandara Suvarnabhumi, kelompok pro-pemerintah menegaskan akan menggelar unjuk rasa jalanan.

Ancaman itu meningkatkan kekhawatiran kemungkinan terjadinya bentrok antara dua kubu. "Yang mereka lakukan itu tindakan teroris," nilai Jatuporn Prompan, politisi partai berkuasa dan pemimpin anti-PAD, Aliansi Demokratik Menentang Kediktatoran (DAAD). Seorang anggota kelompok pendukung pemerintah di Kota Chiang Mai menembak tewas seorang aktivis antipemerintah.

Aksi penembakan itu dapat menyulut kekerasan sipil lebih luas. "Pelaku penembakan menyeret seorang pria berusia 50-an tahun keluar dari mobilnya sebelum kemudian menembaknya hingga tewas. Lelaki yang tewas itu mengelola radio antipemerintah," ungkap anggota polisi, Letnan Kolonel Atipol Thongdaeng kemarin.

Kekacauan itu membuat pasar saham dan nilai mata uang baht Thailand terus merosot. Para investor khawatir krisis politik akan memperburuk ekonomi Thailand yang terkena imbas krisis finansial global. Walau begitu, harga saham naik menjelang penutupan perdagangan karena muncul dugaan Somchai akan mundur.

Menteri Keuangan Thailand Suchart Tadathamrongvej menegaskan, unjuk rasa dapat merusak ekonomi di negara yang sangat tergantung pada industri pariwisata dan ekspor. Ditambah lagi krisis ekonomi global yang saat ini menerjang berbagai negara. Pemerintah memperkirakan bahwa ekonomi hanya akan tumbuh 4,5% tahun ini.

Penumpang Marah

Sementara itu, ribuan calon penumpang pesawat marah dan terlantar di bandara. Mereka terpaksa tidur di atas tas-tas mereka di Suvarnabhumi. Calon penumpang itu marah karena para karyawan bandara justru melarikan diri saat pengunjung rasa menduduki bandara. "Kami datang ke sini dan kami melihat semua orang ini berpakaian kuning. Kami pikir mereka penggemar sepak bola.

Kini kami hanya bisa menunggu," ungkap seorang warga Belanda yang mengaku bernama Mark. Maskapai nasional Thai Airways menyatakan, 16 penerbangan domestik telah dialihkan ke

bandara lama Bangkok Don Muang, 45 km dari Suvarnabhumi. Sedangkan tiga penerbangan lainnya dialihkan ke bandara era Perang Vietnam yang terletak 150 km di tenggara Bangkok.

Sebagian besar maskapai menghentikan penerbangan menuju ibu kota Thailand. Padahal, bandara utama di Bangkok itu setiap hari melayani 125.000 penumpang. Pemerintah Thailand saat ini sudah mulai mengevakuasi 3.000 penumpang yang terjebak di bandara. Polisi hanya bisa melihat aksi pengunjung rasa menduduki bandara.

Mereka tidak ingin memperburuk situasi dengan berkonfrontasi melawan PAD. Meski demikian sejumlah baku tembak terjadi di jalanan pada Selasa (25/11) saat anggota PAD yang bersenjata bentrok dengan pendukung pemerintah. "Sedikitnya 11 orang terluka akibat bentrok yang ditayangkan di televisi Thailand," ungkap pejabat pemerintah.

Tayangan TV itu tampak mendiskreditkan PAD yang mengklaim mendapat dukungan dari kelas menengah dan elite perkotaan. Sementara itu, pemerintah di penjuru dunia memperingatkan warganya untuk menghindari Thailand. Pemerintah China, Prancis, Selandia Baru, Singapura, Inggris, Amerika Serikat (AS), Australia, dan Jepang meminta warganya tidak pergi ke Bangkok dan meminta mereka bertindak hati-hati jika telah berada di Thailand.

"Kedutaan Besar (kedubes) China menasihati warganya yang berencana berkunjung ke Thailand. Warga China yang saat ini berada di Thailand harus hati-hati dengan keselamatan mereka dan menghindari daerah unjuk rasa serta demonstrasi," papar peringatan perjalanan di situs Kedubes China di Bangkok.

Peringatan yang sama juga muncul dari Kementerian Luar Negeri Prancis dan Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru meminta para penumpang yang terperangkap di Suvarnabhumi untuk tetap bersama wisatawan lain serta mengikuti perintah yang dikeluarkan pejabat setempat. "Warga Selandia Baru, jika mereka bisa, hindari perjalanan ke Thailand hingga situasi stabil," ungkap situs Pemerintah Selandia Baru.

Dibatalkan

Sementara itu, seluruh rute penerbangan ke Bangkok dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dibatalkan akibat ditutupnya Bandara Suvarnabhumi. Menurut Kepala Administrator Bandara Herry Bhakti, terdapat sekitar enam penerbangan ke Bangkok yang dibatalkan. "Mau bagaimana lagi, tadinya kita pikir cuma sebentar, ternyata tidak.

Ya otomatis kita batalkan,"ujarnya saat dihubungi SINDO kemarin. Herry menambahkan, pembatalan penerbangan dimulai kemarin hingga hari ini. Herry juga mengatakan pembatalan ini sifatnya mendadak karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak bandara Suvarnabhumi.

Pada Selasa (25/11), sekitar pukul 23.00 WIB, penerbangan Garuda nomor penerbangan 866 yang mengangkut 150 penumpang terpaksa balik lagi ke Cengkareng pukul 00.00 WIB. Sejumlah maskapai penerbangan yang dijadwalkan akan terbang ke Bangkok sedikitnya ada tiga maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Thai Airways, dan Air Asia. (Koran Sindo)

6. LAPORAN OECD Australia Akan Terbebas dari Krisis

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memprediksi Australia akan menjadi satu dari sedikit negara industri maju yang mampu melewati krisis ekonomi global.

Organisasi yang berbasis di Paris itu menyebutkan, Australia masih mampu mempertahankan surplus anggarannya dan terhindar dari resesi ekonomi dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 1,7 persen dan 2,7 persen pada 2010.

Kabar gembira bagi Australia itu didasarkan pada laporan World Economic Outlook OECD seperti dikutip Harian The Australian, kemarin.

Hanya saja, OECD memperkirakan angka pengangguran di Australia mencapai 5,3 persen pada akhir 2009 dan naik menjadi enam persen pada akhir 2010.

Untuk mempertahankan kinerja ekonomi negaranya di tengah ketidakpastian ekonomi global, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd telah meluncurkan strategi keamanan ekonomi dengan biaya 10,4 miliar dolar Australia.

Strategi keamanan ekonomi itu bermakna bahwa pemerintah Australia akan melakukan apa pun yang mungkin untuk mempertahankan ekonomi negara tetap tumbuh, mencetak lowongan kerja baru, memperbanyak perumahan baru, membantu rakyat yang paling terkena dampak krisis, serta mempersiapkan masa depan.

Australia termasuk salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang terkena dampak dari memburuknya kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS).

Negara berpenduduk lebih dari 21 juta jiwa itu merupakan salah satu anggota OECD.

Organisasi ini merupakan forum konsultatif internasional terdepan untuk analisis dan evaluasi kebijakan terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan perdagangan bagi negara-negara industri maju. Organisasi ini memberikan saran-saran kepada setiap negara anggotanya. (Suara Karya)

7. KTT Asean Tetap Diselenggarakan di Thailand

Menteri luar negeri Thailand, Kamis (27/11), mengatakan KTT regional akan tetap dilaksanakan sesuai rencana walaupun ada kekuatiran dari semua negara di seluruh dunia tentang protes-protes yang telah menutup bandara-bandara utama.

Menlu Sompong Amornviwat, yang terlantar di Jerman setelah bandara internasional utama diserbu para pemrotes, mengatakan ia dibanjiri pertanyaan dari menlu-menlu asing tentang kekacauan itu.

"Beberapa negara sangat cemas dengan insiden-insiden yang terjadi di negara kami sekarang-- tidak ada norma hukum," kata Menlu itu kepada *AFP* melalui telepon.

"Banyak negara kuatir kedubes-kedubes mereka mungkin diduduki para pemrotes. Para menlu telah berulang kali menanyakan kepada saya tentang apa yang terjadi."

Sompong mengatakan keputusan akhir tentang apakah Thailand akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang menurut rencana akan diselenggarakan Desember di kota Chiang Mai, Thailand utara tergantung pada PM Somchai Wongsawat.

"Sampai sekarang saya menegaskan bahwa KTT itu akan tetap diselenggarakan sesuai rencana tetapi saya akan membicarakan masalah ini dengan perdana menteri dan ia akan membuat keputusan amakhir," kata Sompong dari Frankfurt.

Laos, Kamboja dan Vietnam mengemukakan bahwa kemungkinan KTT ASEAN ditunda karena krisis politik yang memburuk di Thailand. Sompong berada di Peru bersama dengan Somchai untuk menghadiri KTT APEC. Selama mereka tidak ada, para pemrotes meningkatkan aksi enam bulan mereka untuk menggulingkan pemerintah, mengepung bandara internasional Suvarnabhumi, Selasa dan menutupnya.

Somchai pulang ke Thailand Rabu dengan menumpang sebuah pesawat khusus yang mendarat di Chiang Mai, di mana ia menyelenggarakan sidang kabinet untuk membicarakan kekacauan yang kian meningkat itu. Ia menolak imbauan panglima militer untuk menyelenggarakan pemilu baru. (Media Indonesia)

I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. KPK Awasi Aliran Bantuan Luar Negeri

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi dan mengevaluasi aliran dana bantuan dari luar negeri yang diterima berbagai instansi, baik di pusat maupun daerah.

"Kami ingin bantuan luar negeri itu kita evaluasi, bantuan dari negara mana, tujuannya apa lalu bagaimana perwujudannya," kata Ketua KPK Antasari Azhar di Jakarta, Rabu (26/11).

Antasari menegaskan, KPK tidak akan ragu untuk mengusut aliran bantuan luar negeri jika ada indikasi tindak pidana korupsi.

Untuk memperlancar pengawasan, KPK meminta tenaga tambahan dari kejaksaan dan kepolisian.

"Itu untuk tenaga supervisi," kata Antasari.

Selain bantuan luar negeri, KPK akan mengoptimalkan pengawasan penggunaan keuangan negara di tingkat pusat dan daerah.

Untuk Pengawasan di tingkat daerah, menurut dia, mewajibkan petugas KPK untuk lebih banyak berkunjung ke daerah.

Antasari menegaskan, pengawasan tersebut tidak didasarkan pada kecurigaan, tapi berdasarkan kewajiban dan kewenangan KPK untuk melakukan supervisi penyelenggaraan negara. (Jurnal Nasional)

2. Pejabat Diminta Waspada Intel Asing

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

PEJABAT negara diminta melihat tudingan Adam Malik (almarhum) sebagai agen rahasia Amerika Serikat (CIA) sebagai pembelajaran. Alasannya, saat ini praktik intelijen sangat wajar digunakan untuk memberi pengaruh dan mencari tahu informasi tentang suatu negara beserta kebijakannya.

"Pejabat yang menduduki posisi strategis harus berhati-hati dengan asing, mana yang boleh dikemukakan dan mana yang tidak," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi di sela-sela seminar peserta regular Lemhannas di Jakarta, Rabu (26/11).

Dia menjelaskan, dua kemungkinan seseorang direkrut atau dinyatakan sebagai agen. Pertama secara institusional, yaitu dengan perekrutan kelembagaan di mana perekrut dan yang direkrut sama-sama tahu. Kedua lewat hubungan personal, pihak yang direkrut tidak menyadari kalau dia diposisikan sebagai agen.

Adam Malik dituduh agen CIA dalam buku *Legacy of Ashes, The History of CIA* yang dibuat Tim Wiener, wartawan harian *The New York Times*. Buku tersebut menyatakan, Adam Malik direkrut dan dikontrol Clyde McAvoy, seorang petinggi CIA.

Dia menjelaskan, mungkin benar McAvoy pernah melakukan dialog dengan Adam Malik. Hanya saja, McAvoy diduga mengambil kesimpulan sepihak. Adam Malik dianggap sudah dipengaruhi dan mengikuti keinginannya. "Padahal belum tentu," katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk membentuk tim khusus guna mencari info dan memberi klarifikasi terhadap tudingan tersebut. Tidak cukup klarifikasi dari keluarga. Pasalnya, Adam Malik dituding sebagai agen saat dia menjabat sebagai Duta Besar RI di Moskow.

"Bangsa ini ikut direndahkan karena pejabatnya dianggap dibeli negara lain," katanya.

Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Dia mengaku tidak percaya Adam Malik agen CIA. Menurut dia, apa yang dilakukan Adam Malik sebagai seorang pejuang adalah demi kepentingan negara dan bangsa.

"Jadi, saya tidak percaya itu," katanya. (Jurnal Nasional)

B. EKONOMI :

1. RI - China Saling Undang Untuk Berinvestasi

Pemerintah Indonesia cq Departemen Perindustrian (Depperin) dan Pemerintah China cq Provinsi Shaanxi saling membuka diri dan mengundang masing-masing negara untuk dapat meningkatkan kerjasama bisnis dan investasi.

Hal tersebut terjadi dalam Forum Kerjasama Industri RI-RRT Khususnya Departemen Perindustrian dengan Provinsi Shaanxi yang dihadiri oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Duta Besar Cina untuk Indonesia Zhang Qi Yue, serta Gubernur Provinsi Shaanxi Yuan Chun Qing, di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, bahwa realisasi investasi asing di Indonesia pada 2007 hingga semester pertama 2008 telah mencapai 10,3 miliar AS dolar. Namun sayangnya investasi China di Indonesia baru mencapai 0,3 persen dari total investasi yang masuk.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi China yang demikian tinggi, dia mengharapkan investasi China akan mengalir ke Indonesia sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ya investasi China masih kecil 0,3 persen. Karena itu, forum ini juga bisa jadi upaya kita untuk menarik investasi China lebih besar lagi di Indonesia," ujar dia.

Fahmi menambahkan dengan berbagai kebijakan yang mendukung pada perbaikan iklim investasi dan pembangunan industri di Indonesia, sebenarnya memberikan peluang tidak saja bagi para pelaku usaha di Indonesia tetapi juga para pelaku usaha asing termasuk China.

Dia sempat menyebutkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan perbaikan iklim usaha seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang intinya memberikan jaminan kepastian usaha bagi investor, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional untuk memberikan fasilitas dan insentif fiskal dan non fiskal dalam bentuk pengurangan pajak, tarif, dan pelayanan satu atap, penyederhanaan birokrasi, serta hak penggunaan tanah berusaha dalam kawasan ekonomi khusus untuk 95 tahun.

Sementara itu, Gubernur Shaanxi Yuan Chun Qing mengatakan, posisi Indonesia di ASEAN sangat penting. Karena itu Pemprov Shaanxi mencoba mendorong kerjasama lebih besar lagi antara Indonesia dan provinsi Shaanxi.

"Nilai perdagangan kami tumbuh 114 persen saat ini dibanding tahun 2006. Bahkan dalam kondisi krisis ini pertumbuhan ekonomi tidak terganggu dan diprediksi akan semakin meningkat," katanya. (ANTARA)

2. Sektor Agrobisnis Akan Pulih Enam Bulan Lagi

Penurunan harga komoditas, terutama perkebunan, tidak membuat prospek investasi sektor ini meredup. Kalangan analis, pengusaha, dan pemerintah optimistis harga komoditas, terutama minyak sawit mentah, akan tumbuh positif pada awal semester II tahun 2009.

Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih di sela-sela seminar "Agribusiness Outlook 2009" di Jakarta, Rabu (26/11), mengatakan, konsumen sudah mulai menyesuaikan diri dengan dampak krisis dan mulai meningkatkan belanja pada Semester II-2009. Seminar ini diselenggarakan oleh tabloid Agrina.

"Pasar yang pulih tidak hanya domestik, internasional juga demikian. Jadi, koreksi pasar akan terjadi pada akhir kuartal II dan permintaan komoditas perkebunan mulai naik lagi karena orang tetap membutuhkan makanan," kata Bungaran.

Harga-harga komoditas naik tajam sejak semester II-2007 sampai semester I-2008. Sejak Juli, harga komoditas turun mengikuti harga minyak bumi. Harga minyak sawit mentah (CPO) anjlok 67 persen dalam lima bulan, demikian juga karet.

Koreksi tajam, ujar Bungaran, terjadi akibat lonjakan harga terlalu tinggi saat permintaan biofuel meningkat. Oleh karena itu, harga-harga komoditas perkebunan akan segera mencari titik keseimbangan baru.

Pendapat serupa disampaikan pengamat agrobisnis dari Institut Pertanian Bogor, Tungkot Sipayung. Menurut dia, produksi pertanian tidak akan terlalu terpengaruh krisis karena permintaan di pasar tetap ada.

Pertumbuhan perekonomian Asia sebesar 6 persen selama lima tahun terakhir juga turut menggairahkan pasar komoditas.

"Sudah saatnya pemerintah meningkatkan orientasi ekspor ke pasar Asia. Hampir 60 persen penduduk dunia berada di Asia dan mereka kini mengarah ke kelompok berpendapatan kelas menengah," kata Tungkot.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, walau tetap memiliki peluang yang besar, sektor agrobisnis akan menghadapi tekanan yang tidak ringan, terutama di pasar domestik.

Investor agrobisnis diharapkan bisa menjalankan berbagai strategi untuk bertahan, setidaknya enam sampai delapan bulan ke depan. "Pada periode inilah semua pihak diharapkan bisa memanfaatkan momentum. Pemerintah terus untuk mendukung pertumbuhan agrobisnis nasional," ujar Bayu. (Kompas)

3. RI-Belgia Kembangkan Pelayaran Langsung

Menteri Perhubungan Jusman Sjafii Djamil menerima kunjungan putra mahkota Belgia, Pangeran Philippe, dan sejumlah delegasi dari negara tersebut di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu (26/11). Dalam pertemuan itu dibahas soal keinginan Pemerintah Belgia untuk lebih meningkatkan perdagangan melalui pelayaran langsung (direct call) dari Tanjung Priok menuju beberapa pelabuhan di Belgia dan sebaliknya.

"Pangeran Philips dan rombongan para pengusaha asal Belgia, selain menawarkan kerja sama perdagangan, juga mengupayakan kerja sama di bidang pendidikan tentang pengelolaan pelabuhan yang lebih efektif dan efisien," kata Jusman.

Pertemuan itu, menurut Jusman, akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan secara bisnis dengan para pengusaha nasional yang juga ikut dalam pertemuan itu. Perdagangan yang telah terbina selama ini yaitu terkait dengan batu bara, kayu, tekstil, dan gas. Karena itu, rombongan delegasi itu menginginkan adanya direct call dan tidak perlu lagi transit melalui Singapura.

Ini juga perlu dilakukan agar terjadi efisiensi perdagangan di antara kedua negara. Pertemuan yang digelar di kantor PT Pelabuhan Indonesia II itu dihadiri 35 pengusaha yang mendampingi Pangeran Philippe, putra mahkota Kerajaan Belgia. Beberapa di antaranya adalah Menteri Ekonomi dan Reformasi Belgia Vincent van Quickenborne dan Dubes Belgia untuk Indonesia Marc Trenteseau.

"Kedatangan Pangeran Philippe ke Tanjung Priok atas inisiatif pribadi. Beliau memang ingin secara langsung melihat kondisi di sana. Ini hanya pertemuan biasa. Kami dan Pangeran

Philippe hanya berdiskusi seputar kegiatan pelayaran di Indonesia. Jadi, tidak ada MoU atau sejenisnya," ucapnya.

Disebutkan, Port of Zeebrugge dan Port of Antwerp adalah dua pelabuhan Belgia yang bakal menjadi destinasi dalam kerja sama pelayaran langsung dari Tanjung Priok tersebut. Port of Antwerp merupakan pelabuhan kedua terbesar di Eropa setelah Rotterdam di Belanda. "Memang sudah ada dua perusahaan menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia dan itu perlu dilakukan pembicaraan lanjutan," katanya.

Selain membuka rute pelayaran langsung, dijajaki pula kerja sama bantuan teknis untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia agar lebih efisien dan efektif. Usai berdiskusi, Menhub mendampingi Pangeran Philippe meninjau langsung sejumlah lokasi di area pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut. "Kerja sama Indonesia dengan Kerajaan Belgia seputar kegiatan pelayaran telah dilakukan sejak lama. Selama ini Antwerp memberikan pelatihan tentang manajemen kepelabuhanan kepada RI yang sudah berlangsung sejak lama," tuturnya.

Data statistik menyebutkan, kegiatan ekspor-impor kedua negara ini bernilai 1,2 miliar dolar AS per tahun dan Belgia adalah negara dengan peringkat keenam sebagai tujuan utama ekspor Indonesia. (Suara Karya)

4. Pinjaman luar negeri tak dijadwal ulang

Pemerintah tidak akan mengajukan permohonan penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo 2009, kendati beban pembayarannya membengkak menyusul pelemahan nilai tukar rupiah.

Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan pemerintah tetap akan membayar seluruh kewajiban pinjaman luar negeri yang jatuh tempo tahun depan, meski beban pemerintah dari sisi pengeluaran rupiah makin besar.

"Sampai saat ini, kita tetap akan membayar semua kewajiban-kewajiban itu. Belum ada pemikiran untuk menunda atau rescheduling," ujarnya selepas penandatanganan Loan Agreement Hibah Pemilu dari Inggris untuk Indonesia hari ini.

Paskah mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lain terutama dolar AS telah mendorong peningkatan beban fiskal pemerintah. Nilai tukar rupiah yang anjlok memaksa pemerintah untuk mengalokasikan rupiah dalam jumlah besar terutama untuk membayar pinjaman luar negeri, selain juga pembiayaan ekspor dan impor.

Pada perdagangan akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menyentuh level Rp13.150, sebelum kemudian menguat pada kisaran Rp12.000 hari ini. Angka ini jauh dari yang dipatok dalam APBN-P 2008 yang Rp9.100.

Berdasarkan data Direktorat Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo pada 2009 mencapai US\$6,514 miliar. Angka ini hampir tiga kali lipat dari pinjaman luar negeri yang jatuh tempo pada 2008 yang US\$2,894 miliar.

Berdasarkan persentase, pinjaman luar negeri dalam mata uang asing terbesar berasal dari yen Jepang pada kisaran 40%, kemudian disusul dolar AS sekitar 28%, euro 17%, lain-lain 9,5%, dan poundsterling 1,9%. Hingga 31 Oktober, pembayaran pokok, bunga, dan biaya pinjaman luar negeri mencapai Rp59,23 triliun atau 71% dari rencana pembayaran hingga akhir tahun ini yang dipatok Rp83,21 triliun. (Bisnis Indonesia)

C. SOSBUD

1. JiFFest Ke-10 Suguhan Film-film Terbaik

SEBENTANG kehidupan yang pedih terpaksa dilakoni Mira dan Nur, dua perempuan di lereng Gunung Bolo, Kecamatan Kauman, Jawa Timur, atau sekitar 214 km dari Surabaya ke arah Tulungagung. Demi menghidupi anak-anaknya, dua perempuan ini menjalani dua kehidupan yang unik, sekaligus miris.

Siang, mereka menggeluti profesi sebagai pemecah batu. Di malam hari, melayani kebutuhan seks para lelaki hidung belang di sebuah kompleks pemakaman China. Imbalan, antara Rp10 ribu-Rp25 ribu. Kisah nyata itu diangkat oleh Ucu Agustin, sutradara muda dalam antologi film dokumenter: *Pertaruhan*.

Empat film lain mengangkat isu tentang perempuan lewat wacana tubuh. Sejumlah sutradara muda yang terlibat: Iwan Setiawan dan M Ichsan, Lucki Kuswandi dan Ani Ema Susanti. "Film-film itu berbicara tentang hak kesehatan reproduksi perempuan, mitos keperawanan, pekerja seks, dan sunat perempuan lewat cerita dokumenter," kata Nia Dinata, produser antologi *Pertaruhan* di Jakarta, kemarin.

Antologi film dokumenter ini merupakan salah satu klasifikasi dari puluhan film Indonesia dan ratusan film dari 24 negara yang berkiprah di *Jakarta International Film Festival (JiFFest)* ke-10 tahun 2008 yang akan berlangsung 5-9 Desember datang. *JiFFest* akan diputar di Platinum XXI FX, Bliz Megaplex Grand Indonesia, dan berbagai pusat kebudayaan: Erasmus Huis, Kineforum TIM, Galeri Cipta TIM, Goethe Haus, dan lain-lain.

Klasifikasi lain yang tampil di *JiFFest* ke-10 ini adalah *Human Loves Human Section*, dipersembahkan oleh Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ada empat judul film asing yang disebutkan sebagai kampanye sosial Kontras. Tujuan, mencegah tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Karya seni dan budaya, termasuk film ini, merupakan salah satu cara kami selain lewat jalur politik dan hukum," kata Usman Hamid, Koordinator Kontras.

Usman mengatakan, keterlibatannya dalam *JiFFest* kali ini bertepatan dengan ulang tahun ke-60 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Film-film yang ditampilkan tidak hanya yang menghibur, tapi juga mengundang inspirasi untuk melakukan sesuatu yang besar dan bermakna.

JiFFest digagas oleh Shanti Armayn sembilan tahun silam dan diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI). *JiFFest* juga menampilkan 10 film Indonesia yang paling laris dalam 10 tahun terakhir, dan juga diputar film-film terbaik Indonesia yang dirilis sejak Oktober 2007 sampai September 2008. "Kriteria film terlaris, minimal harus mendatangkan 1,3 juta penonton di gedung bioskop," kata Shanty.

Secara keseluruhan, *JiFFest 2008* akan dibuka dengan *Gala Opening* lewat film *Burn After Reading* karya sutradara terbaik peraih *Academy Award 2008*, Joel dan Ethan Coen. Kemudian ditutup dengan film *Vicky Cristina Barcelona* karya Woody Allen. "Kami mohon maaf, akibat krisis ekonomi global, tahun ini *JiFFest* hanya berlangsung lima hari. Sebelumnya 10 hari," kata Shanty. (Jurnal Nasional)

- D. **HANKAM** : **Tidak Ada**
- E. **HUKUM** : **Tidak Ada**
- F. **OLAH RAGA** : **Tidak Ada**
- G. **LINGKUNGAN HIDUP** :

1. **Climate change threatens food resilience in some regions**

The current climate change could threaten the food resilience in several regions, therefore anticipation and adaptation programs were needed to deal with the problem, an official said.

"The case in East Nusa Tenggara (NTT) has showed that the climate has changed. It's due to the global warming," Deputy Economic Coordinating Minister in charge of agriculture and fishery Bayu Krisnamurthi said here on Monday.

However, despite the climate change, no regions had comprehensive adaptation programs to deal with the problem, he said.

The government would make a pilot project on climate change adaptation in NTT at the rural level by inviting the people to adjust themselves to the new climate situation, he said.

"The program will cover 150 villages in six districts, by involving 6,000 households. The six districts include Belu, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Timur, and Lembata," he said.

NTT has been selected as the location of the pilot project in Indonesia because NTT is one of the regions which are prone to the climate change impact.

Other regions prone to the climate change impact are eastern Sulawesi and Kalimantan.

The project will be fully financed by UN funds as recommended by the Bali Climate Change conference last year.

The project will be implemented for five years starting 2009 with estimated funds amounting to around US\$1.5 million, he said. (ANTARA)

III. ARTIKEL

:

1. No recession in Indonesia (by Terry Lacey)

The United States, European Union and Japan are in economic recession. But there is no global recession. The countries of the South, including Indonesia, currently the second largest Muslim economy in the world, face an economic downturn.

President Susilo Bambang Yudhoyono and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati are already doing what British Prime Minister Gordon Brown proposed for the UK, Europe and the U.S., to bolster liquidity and stimulate consumer and public demand.

With Keynesian pump priming and mobilization of the state bureaucracy and private sector together, Indonesia may, at the worst, lose half a per cent growth in 2009.

This will not be helped by the International Monetary Fund (IMF) nor economists from the Economic Intelligence Unit (EIU) attempting to impose a recession on Indonesia and the developing world.

A recession means that a national economy has suffered negative economic growth in two successive quarters.

Now the IMF and EIU tell us a world recession is when global growth falls below 3 percent or 2.5 percent. Then the EIU argues Indonesian growth might fall to 3.7 percent in 2009, when the local consensus is 5.5 percent.

They used to say in the second world war in the UK that dangerous talk costs lives. In this case dangerous talk could cost Indonesian money and jobs.

Confidence is everything. Despite global conditions Indonesian economic growth in 2009 is a function of leadership and capacity. Indonesia has the first and must rapidly improve the second. Politics must decide economics, not the reverse.

This crisis of confidence in the Western banking and financial system comes during the dying days of the most unpopular American Presidency in living memory.

President-elect Obama and Nancy Pelosi, the Speaker of the House of Representatives, have their work cut out. The new Democrat leadership has inherited an economic disaster and must fight desperately to save the U.S. auto industry before it collapses, while two million Americans may lose their homes, and millions may lose their jobs.

Yet the devastating legacy of the Bush Presidency, of greed and war, leaves open great opportunities for Indonesia, the Muslim world and developing countries of the South.

Indonesia can play a key role in leading the world towards economic recovery.

First by managing the national economy to maintain growth, demand, imports and exports. The nominal Gross Domestic Product for 2009 is projected at US\$547 billion. Indonesia is already in the top 20 economies of the world.

Indonesia is overtaking Belgium and Sweden in GDP size. It can overtake Turkey, the Netherlands and Austria and join the top ten world economies within two decades.

Second, by mobilizing investment for oil, gas, energy projects, bio-fuels, infrastructure (roads, railways, ports), manufacturing and retailing. Indonesia needs over \$50 billion for electricity alone, to finance 40,000 Mwe of power and transmission lines by 2025. Total foreign investment needed in the next 15 years exceeds \$100 billion.

Alongside the U.S. and EU Indonesia is getting new investment from the BRICs (Brazil, Russia, India, China) and from APEC countries like Canada, Japan, Korea, Taiwan as well as ASEAN States including Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Investment for infrastructure, agriculture and biofuels is coming from the Gulf States, Saudi Arabia and Israel.

Third Indonesia can help lead Muslim and southern economies by using its economic size and prestige as a member of the U.N. Security Council to work with southern countries to change policies and the balance of power in the World Bank, the IMF and the World Trade Organization.

As the Indian Finance Minister, P. Chidambaram told the India World Economic Forum on Tuesday the G-20 has replaced the G-7 as the key body to tackle economic problems.

Indonesia has major reservations about the IMF following its own experience in 1998. German Finance Minister Peer Steinbrueck recently said that the world should not slip into creating a shadow world economic government run by an inner IMF council.

Indonesia lost 10 years as a result of the 1998 banking crash when it put its fate in the hands of the IMF, which initially failed to understand Indonesian strengths and exaggerated weaknesses.

An historical photo showed President Soeharto sitting at his desk, signing his own political death-warrant while the IMF Representative stood over him, as he signed an IMF agreement.

In the 1998 bank crash Indonesia had no freedom and no choice. This time in 2008 Indonesia has freedom and is stronger, and can chose to tread its own path.

Hopefully its greater strength and determination will inspire Muslim and southern countries not to panic in the face of recession in the West, but to work together to combat recession and economic downturn and to build a new world economic order. (The Jakarta Post)

2. Janji APEC Atasi Krisis Dalam 18 Bulan (Oleh Dody Ardiansyah)

Pertemuan pemimpin ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke-16 yang diselenggarakan di Lima, Peru, ditutup Minggu (23/11) lalu dengan kesepakatan yang sangat berani, yaitu bersama mengatasi krisis keuangan yang tengah melanda dunia dalam waktu 18 bulan.

"Kami meyakini bahwa kami bisa mengatasi krisis ini dalam 18 bulan,"demikian salah satu isi pernyataan dari dokumen tambahan Deklarasi Lima itu.

Namun, deklarasi itu tidak merinci langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 18 bulan `perang` melawan krisis keuangan ini. Deklarasi itu hanya menyebutkan upaya yang akan dilakukan antara lain melakukan langkah nyata yang cepat dan pasti untuk berkerja sama lebih erat dalam aturan yang koordinatif dan komprehensif untuk menerapkan langkah nyata ke depan menghadapi krisis.

Target 18 bulan itu sendiri, berawal dari keinginan Presiden Peru, Alan Garcia Perez, yang mengharapkan ada kesepakatan politik para pemimpin APEC untuk bersama mencari dan menerapkan kebijakan yang terintegrasi dalam mengatasi krisis.

"Kita akan mampu mengatasi krisis ini," kata Garcia dalam pidato pengantar deklarasi itu.

Dalam deklarasi itu, APEC juga sepakat untuk mendukung upaya badan kredit ekspor, lembaga keuangan internasional dan bank swasta untuk memastikan bahwa kecukupan keuangan tersedia untuk usaha termasuk bagi usaha kecil menengah dan menjaga agar perdagangan dan investasi tetap berlangsung di kawasan.

Mengenai reformasi sektor keuangan, para pemimpin ekonomi APEC juga setuju untuk melanjutkan pembangunan dan inovasi dalam sektor keuangan dan percaya bahwa semakin dalam dan kompleks sistem keuangan, alat pengaturan dan pengawasan harus lebih efektif. Krisis juga menyoroti kebutuhan untuk menciptakan standar yang lebih efektif dari tata pemerintahan dan manajemen resiko sesuai dengan pentingnya tanggung jawab sosial dalam sektor keuangan.

APEC, di mana Indonesia menjadi salah satu pendirinya, juga menyambut baik Deklarasi Washington hasil kerja negara-negara G-20 pekan lalu yang secara kuat mendukung dilakukannya rencana aksi untuk mereformasi pasar keuangan.

Dalam hal ini, APEC sangat mendukung kebijakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dengan melakukan kerjasama makroekonomi lebih dekat, menghindarkan dampak negatif, mendukung negara berkembang dan reformasi menyeluruh serta penguatan lembaga keuangan internasional.

APEC menegaskan, kepercayaannya bahwa prinsip pasar bebas dan perdagangan terbuka serta rejim investasi akan terus berlanjut menuju pertumbuhan ekonomi dunia, bertambahnya tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Para pemimpin APEC juga berharap agar lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) lebih memperkuat kolaborasinya dengan lembaga keuangan internasional lainnya, dan meningkatkan upaya untuk mengintegrasikan peraturan dan pengawasan tanggungjawab pada kerangka kerja kehati-hatian dan mengatur pelatihan kesiagaan.

APEC juga menilai, krisis keuangan global yang terjadi saat ini adalah satu dari sekian banyak tantangan paling serius yang pernah dihadapi anggotanya, sehingga bersepakat untuk bertindak cepat dan tegas untuk mengarahkan pelambatan pertumbuhan ekonomi yang segera terjadi.

APEC juga menyambut baik kebijakan pemberian stimulus moneter dan fiskal yang dikeluarkan anggotanya, dan akan mengambil langkah ekonomi dan fiskal terukur yang dibutuhkan untuk menjelaskan krisis ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberikan harapan bagi bagi yang membutuhkan.

Target bangkit dari krisis dalam 18 bulan juga didukung para pemimpin ekonomi APEC lain seperti Presiden Meksiko Felipe Calderon dan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper yang menyampaikan bahwa jadwal 18 bulan itu lebih merupakan tujuan dan bukan perkiraan.

Pemerintah Indonesia seperti disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu hanya berkomentar bahwa ini merupakan sikap tegas APEC dan Indonesia mendukungnya untuk mencapai itu. "Tinggal bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan," katanya.

Target yang tegas itu mungkin memang dirasa perlu ditetapkan agar APEC benar-benar menggunakan potensinya sebagai pemilik kekuatan 55 persen ekonomi dunia untuk berperan dalam mengatasi krisis keuangan ini.

"Pertemuan ini akan memberikan sesuatu yang penting bagi dunia, dan saya yakin negara-negara APEC akan memberikan kontribusi signifikan untuk menjawab situasi ini," kata Presiden Amerika Serikat George W Bush saat berpidato dalam forum APEC CEO summit itu.

Bush juga meyakini meski pemulihan dari krisis keuangan ini akan mengambil waktu lama, namun kekuatan ekonomi APEC akan mampu mengatasinya. "APEC telah membuktikan bahwa mereka mampu untuk mengatasi berbagai krisis yang lebih besar seperti pandemik dan bencana alam," katanya.

Terlepas dari target waktu mengatasi krisis keuangan, pertemuan APEC ini menurut Mendag mendapatkan kemajuan penting dengan kesepakatan para pemimpin ekonomi APEC untuk segera mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan kesepakatan Putaran Doha WTO.

"Kesepakatan para pemimpin ini penting untuk anggota APEC segera melakukan negosiasi di bidang agrikultur sebelum pertemuan WTO Desember mendatang. Para pemimpin APEC sudah memerintahkan menterinya untuk berunding di Genewa minggu ini," katanya.

Terkait dengan itu, Indonesia sudah mengirim wakilnya untuk perundingan negosiasi yang akan berlangsung selama satu minggu yaitu, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Gusman Bustami dan Dubes Indonesia untuk WTO R. Widodo.

Dalam pertemuan itu, lanjut Mari dibicarakan empat hambatan utama terhambatnya pelaksanaan Putaran Doha yaitu mekanisme perlindungan khusus bagi komoditi pertanian yang sensitif, terkisnya pemberian fasilitas terutama bagi negara-negara berkembang, perundingan produk-produk yang sensitif dan isu-isu sektoral.

Pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan negosiasi keempat isu itu sehingga menteri-menteri perdagangan dunia bisa kembali melakukan perundingan WTO pada Desember mendatang.

"Negara-negara telah menugaskan senior officernya untuk langsung ke Genewa. 26 negara termasuk Indonesia bertemu dengan Dirjen WTO Pascal Lamy untuk membahas apa yang harus dilakukan supaya menteri-menteri perdagangan bisa kembali ke perundingan WTO pada Desember," kata Mari.

Dijelaskan Mari, isu mekanisme perlindungan khusus memang merupakan isu utama bagi Indonesia sebagai ketua kelompok negara G33 karena dengan mekanisme itu Indonesia dengan mudah bisa mengenakan bea masuk tambahan ataupun pengurangan terhadap impor, saat terjadi impor dalam jumlah besar dan atau karena harga turun dan anjlok terutama untuk produk-produk pertanian sensitif.

Mengenai sikap Indonesia, Mari menegaskan bahwa Indonesia siap dan fleksibel untuk mendapatkan instrumen yang bisa dioperasionalkan dengan efektif mendukung pelaksanaan Putaran Doha.

"Jadi bagaimana mencari komprominya sehingga kita mendapatkan instrumen yang bisa menjaga kesejahteraan petani, tetapi tidak mengganggu akses pasar seperti yang dikhawatirkan negara maju," katanya.

Seperti forum-forum internasional lain yang telah membahas berbagai persoalan dunia, pertemuan APEC 2008 yang menghasilkan Deklarasi Lima ini diharapkan memberikan solusi nyata mengatasi krisis keuangan dan berbagai masalah lain, dengan tetap berpedoman pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dunia. (ANTARA)

IV. LAIN-LAIN : **T i d a k**
Ada
V. EDITORIAL :

1. Perompak-perompak Somalia

Ada yang berpendapat bahwa perompakan adalah bentuk lain dari terorisme. Kedua-duanya menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan.

Konvensi Hukum Laut PBB (1982) Pasal 101 secara tegas menyatakan, perompakan adalah tindakan kriminal. Pendapat itu didasarkan pada definisi gagasan *mare liberum* (laut terbuka) yang dikemukakan oleh Hugo de Groot (1609). De Groot berpendapat bahwa laut adalah *res communis* (properti bersama umat manusia), yang dijadikan basis perdagangan bebas antarbangsa.

Karena itu, tindakan perompakan membahayakan laut terbuka dan dipandang *hostis humani generis* (musuh kepentingan bersama umat manusia).

Saat ini dunia memang dibuat tidak hanya terperangah, tetapi juga kebingungan bagaimana caranya mengatasi perompakan yang meningkat di perairan Somalia. Peristiwa terakhir, perompakan terhadap supertanker raksasa milik Arab Saudi, *Sirius Star*, yang mengangkut 2 juta barrel minyak mentah senilai 100 juta dollar AS, membuka mata dunia bahwa perompakan tidak bisa dibiarkan dan dianggap enteng lagi.

Sepanjang tahun ini saja, sudah lebih dari 90 kapal yang melintas di perairan Somalia dirompak. Dari jumlah tersebut, 17 kapal di antaranya masih disandera, termasuk kapal *MV Faina*, kapal kargo milik Ukraina yang mengangkut tank, yang dirompak September lalu.

Dari waktu ke waktu daerah operasi para perompak Somali semakin meluas. Menurut *The Christian Science Monitor*, para ekspatriat Somalia di Kenya, Arab Saudi, dan negara-negara di Teluk Persia memberikan informasi kepada para perompak tentang kapal-kapal yang akan melewati daerah operasi mereka dan Teluk Aden.

Kalau informasi itu benar, tentu sangat memprihatinkan. Namun, persoalan perompak Somalia berkaitan erat dengan situasi politik di negeri itu yang tak terurus sejak ambruknya pemerintahan Siad Barre tahun 1991. Karena itu, selama masalah politik belum selesai niscaya juga sulit menyelesaikan masalah perompakan.

Kita tentu sama sekali tidak berharap bahwa perompakan yang kini marak di perairan Somalia akan menjalar ke kawasan selatan Malaka dan Laut China Selatan. Akan tetapi, perlu kita sadari bahwa perkembangan teknologi informasi bisa jadi membuat para perompak di Selat Malaka memperoleh informasi tentang para perompak di Somalia yang pada gilirannya akan menginspirasi mereka.

Karena itu, sebelum semua itu terjadi, perlu digalang kerja sama yang lebih erat dan kuat antarnegara di sepanjang Selat Malaka. Patroli bersama pun harus terus ditingkatkan, termasuk tindakan tegas kepada mereka. (Kompas)

2. APEC and Obama's message

President Susilo Bambang Yudhoyono has made several speeches and press statements where he took the opportunity to boast of his successes -- including his reduction of the poverty rate -- during his recent 13-day overseas trip which ended Tuesday night, to Washington and Peru, where he attended the G-20 Summit and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit, respectively. It seems the President was confident enough -- rightly or wrongly -- to think that his meetings with leaders of other major countries would be very meaningful in dealing with the country's coming economic recession.

The President's trips should be fruitful not just in terms of public diplomacy and his own personal satisfaction, but also in more concrete economic terms for the country. It is not our intention to conclude that the President's costly visit was just a waste of money and time.

And it is just as natural that the President and his economic ministers, including Trade Minister Mari E. Pangestu, would be satisfied with the APEC summit and his bilateral meetings with other world leaders -- despite Indonesian public skepticism. It all looks good and even perfect -- at least on paper.

We Indonesians actually also deserve to have pride in APEC because for 14 years, up to and including Saturday and Sunday's summit in Lima, Peru, the leaders of the 21-member trade grouping have reiterated what they committed to in 1994 when APEC's second summit was held in Bogor, West Java. With Soeharto as the host, the leaders pledged to transform the Asia-Pacific region into a free and open trade and investment area not later than 2010 for industrialized countries and 2020 for developing nations.

We can also be proud that outgoing U.S. President George W. Bush invited our President to attend the summit of the world's top 20 economies (G-20) in Washington. We are indeed on the global economic map!

But still -- for millions of Indonesians -- his most pleasant remarks have nothing to do with his superfluous economic proposals or vows of help from other nations, but with a simple message from U.S. President-elect Barack Obama. But why did such a message come from Obama and not from the (incumbent) President himself?

"I miss *nasi goreng* (fried rice), *bakso* (meatball soup) and rambutan," Obama told Yudhoyono during their five-minute telephone conversation when the latter transited in Seattle on his way home from Peru.

We Indonesians can feel proud that Obama, who will become the most powerful man on the planet on Jan. 20 of next year, still has good memories -- and his *bahasa* Indonesia -- of our country where from 1967 to 1971 he spent his childhood in Jakarta.

But many of us, including our leaders, perhaps naively think that Obama will give special treatment (to Indonesia) just because of his childhood experience here. But we are not alone because many people in other parts of the world -- especially Africa -- share our numerous expectations.

But apart from Obama's nostalgic sentiment about Indonesian food, what did the President really bring back with him from his expensive 13-day trip, which also took him to Mexico and Brazil? The G-20 summit may have positive impacts because many Indonesians rarely realize that their country is not as bad as they often perceive. But what else can we expect from the G-20 and APEC summits?

This newspaper described the G-20 members -- including the United States, the EU, China, Japan and Saudi Arabia -- as representing 85 percent of the world's GDP and two-thirds of the global population. APEC's size is also quite mammoth.

Indonesia is a member of the two wealthy clubs. It is a privilege. But is our presence there more as one of the cheerleaders or as one of the key players?

APEC from the very beginning has been a loose and a voluntary-based organization and in the face of a global economic crisis, APEC members will be much more protective and will put aside their ambitious plans to make their region a completely free-trade area. But for Indonesia, APEC's annual summit and other meetings at least function as an opportunity to conduct multilateral dialogues and meet with other countries' leaders.

Obama's expression that he misses Indonesia is complimentary for us. His past experience with Indonesia can be used as an advantage to promote our country as a tourist destination for U.S. citizens. But we hope that he does not just miss Indonesia's exotic food, but also its other positive aspects.

President Yudhoyono has returned home. It is naive to expect that his overseas trip will bring immediate economic effects, because a global recession will make it much more difficult for Indonesia to lure foreign investors and to rid itself of a recession's severe impacts.

The President does not need to repeat the outcome of his visit. We all know. (The Jakarta Post)

Jakarta, 27 Nopember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu